

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
DANA DESA, *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*, KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)**

SKRIPSI

**Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Rininta Eka Kusumawati
NPM. 17.0102.0085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
DANA DESA, *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*, KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

**Disusun Oleh:
Rininta Eka Kusumawati
17.0102.0085**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya otonomi daerah merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berjalan Indonesia. Upaya penerapan *good governane* merupakan salah satu instrumen yang mencerminkan keinginan pemerintah melaksanakan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas pokok yang harus diemban oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat menuntun warganya menuju kehidupan yang sejahtera, damai dan adil. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tanggap terhadap lingkungannya dengan memberikan pelayanan yang baik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahannya tersebut (Pratiwi & Ulfah, 2018).

Kinerja merupakan hasil pencapaian secara nyata dalam periode tertentu baik secara individu ataupun secara kelompok. Kinerja menjadi tolok ukur bagi perusahaan (Tarjo, 2019). Aparatur pemerintah juga harus mampu melihat peluang, keluar dari kebiasaan yang hanya menunggu perintah, hierarki yang kaku, kurang terampil, dan berdampak kurang memaksimalkan kinerja aparatur, serta kinerja organisasi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja aparatur pemerintah desa adalah satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai

oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Pratiwi & Ulfah, 2018). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2014) tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Kemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kabag Humas Setda Kabupaten Temanggung Sumarlinah, Kabupaten Temanggung memperoleh predikat “B” dalam penilaian tersebut tentunya masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah target kinerja yang belum tercapai dengan sempurna, yaitu terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator kinerja yang belum tercapai di bidang pelayanan publik (krjogja.com). Hal tersebut di ketahui dengan survey yang dilakukan terhadap kepuasan pelayanan publik di masyarakat. Pada tahun 2020, indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 90,34, mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2019 yang memperoleh 79,75. Dengan dilaksanakan survei dapat diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Disisi lain kinerja aparatur pemerintah masih memerlukan pengawasan karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terlihat adanya keluhan dari masyarakat yang diberikan oleh perangkat desa.

Perangkat desa kadangkala berangkat ke kantor pada siang hari dan pulang tidak sesuai jam yang telah ditetapkan, yang seharusnya pagi jam 08.00 dan pulang pada jam 16.00 hal tersebut berbanding terbalik dengan yang sudah ditentukan para aparatur tidak disiplin pada waktu sehingga mempersulit masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Adanya ketidaksinkronan antara aturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa sehingga kinerja aparatur pemerintahakan dinilai buruk.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo masih terdapat indikator yang belum optimal diantaranya yaitu belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, belum optimalnya pemahaman perundang-undangan, dan belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan. Dalam mengelola akuntabilitas dana desa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memfasilitasi pendidikan dan budi pekerti yang luhur. Kemudian pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi semakin canggih untuk memudahkan mengambil informasi dalam pengambilan keputusan (RENSTRA, 2020).

Kinerja aparatur pemerintah desa pada Kecamatan Ngadirejo dalam memberikan pelayanan masih tergolong rendah karena masih terdapat indikator yang belum berjalan dengan baik dalam mengelola dana desa. Kinerja aparatur pemerintah desa terutama terkait dengan pelayanan publik, produktivitas, dan akuntabilitasnya. Hal ini yang menjadi permasalahan dasar pada kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Ngadirejo dalam

melaksanakan kebijakan peraturan pemerintah daerah yang mengatur fungsi dan tugasnya kepala desa. Dari faktor tersebut berdampak pada kualitas pendidikan formal dan informal yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa Kecamatan Ngadirejo.

Sesuai data Rencana Strategis dari Kecamatan Ngadirejo, bahwa masih terdapat desa yang mempunyai kinerja belum maksimal dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Karena untuk SDMnya masih sangat kurang, dan dalam melakukan pekerjaannya masih bertumpu pada satu orang yang mempunyai keahlian dibidangnya atau hanya dikerjakan oleh orang tertentu. Kemudian dalam penggunaan teknologi informasi perangkat desa masih terdapat kesulitan dalam menjalankannya. Sehingga perangkat desa di Desa Giripurno dan Desa Mangunsari kurang menyatu dalam pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan.

Desa Giripurno dan Mangunsari merupakan desa yang berada di Kecamatan Ngadirejo yang belum menyelesaikan laporan kegiatan dengan tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan banyak perangkat desa yang berlatar belakang SMP. Sehingga dalam menggunakan dana desa yang diberikan oleh pemerintah masih belum maksimal. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan pertanggungjawaban dikatakan belum maksimal. Karena kurangnya pengetahuan dalam menggunakan Teknologi Informasi.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Giripurno dan Desa Mangunsari yaitu bapak Adi Setyawan (Sekretaris Desa Giripurno) dan ibu Retno Setyabudi (Sekretaris Desa Mangunsari) pada rabu (01/09/2021) bahwa

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengalami ketidaksesuaian, yang mana antara staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pada saat jam kantor, jam kerja pegawai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat kesulitan menyelesaikan segala keperluannya. Para aparatur desa datang kadang siang dan pulangpun tidak menentu dan membuat masyarakat harus menunggu dalam proses pelayanannya. Kemudian dalam menggunakan teknologi informasi perangkat desa hanya mengandalkan ke satu orang saja. Dengan ketidaksinkronan antara aturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa, hal itu sangat tidak baik untuk dilakukan oleh aparatur pemerintah desa, dan aparatur seharusnya melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman terhadap peraturan pemerintah sangat diperlukan oleh para pegawai sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat berdampak dengan hukum. Aparatur pemerintah diharapkan untuk selalu mempelajari dan mengikuti perkembangan peraturan pemerintah, sehingga permasalahan yang dikarenakan penggunaan aturan lama sampai pada pemahaman peraturan yang salah dapat diminimalisir. Pengelolaan dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap pembangunan desa baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Karima et al., (2021) Hafiz, (2017) dan Razi (2017) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Toto Waksito (2019)

dan Karima et al (2021) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran sudah tertuang dalam 9 program Reformasi Birokrasi Nasional antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dari (Pratiwi & Ulfah, 2018). Penelitian Raheni & Asri, (2019) dan Rumalolas, (2018) bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurbaeti & Nugraha (2019) menunjukkan bahwa *Good government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah. Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuan (Sudiarianti, 2015)). Kapasitas sumber daya manusia harus memadai sangat diperlukan agar mampu menjalankan sistem dengan baik dan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa, dimana mereka yang menjalankan semua kegiatan dalam

pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparatur yang berkualitas dan memiliki kemampuan akuntansi yang baik, maka akan lebih mudah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.

Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Mada et al., 2017). (Rahmawati. H.I, 2015) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Sedangkan menurut Widyatama et al., (2017) kompetensi SDM tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi desa untuk pihak pengambilan kebijakan publik dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.

Selain itu faktor yang berpengaruh kepada aparatur pemerintah desa adalah teknologi informasi. Saat ini kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. hampir semua bidang kehidupan, bisnis dan pemerintahan telah terpengaruh oleh teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki banyak dampak positif, diantaranya mempermudah mendapatkan informasi yang diinginkan, kapanpun dan dimanapun. Semua ini dicapai hanya dengan menghubungkan komputer atau smartphone ke internet. Selain memperoleh informasi, teknologi tersebut juga memudahkan komunikasi dengan pihak lain di seluruh dunia.

Teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Penguasaan teknologi

informasi oleh pegawai organisasi berdampak besar terhadap kinerja organisasi. Berkat penggunaan teknologi informasi ini, organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari tradisional menjadi modern. Teknologi informasi berkaitan dengan layanan karena kualitas layanan adalah kecepatan layanan teknologi informasi (Agatha & Handayani, 2020). Dengan adanya teknologi informasi juga, pelayanan yang diberikan khususnya kepada organisasi akan semakin cepat dan akurat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marhaen & Jaenab (2021) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2020) dan Amran, (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan penelitian dari Agatha & Handayani (2020) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Penelitian ini mengacu dari penelitian Pratiwi & Ulfah (2018) tentang faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa. Dengan persamaan variabel yaitu peraturan pemerintah pengelolaan dana desa, penerapan *good government governance* kualitas sumber daya manusia. Perbedaan penelitian ini **pertama** yaitu menambahkan variabel independen yaitu teknologi informasi sesuai dengan penelitian (Agatha dan Handayani, 2020). Alasan penambahan variabel teknologi informasi yaitu karena dalam mengelola dana desa terdapat prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Sehingga aparatur pemerintah desa harus

dapat memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan baik dan maksimal agar dapat mengelola dana desa semakin baik.

Perbedaan **kedua**, obyek pada penelitian ini yaitu pada Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Alasan penggunaan obyek penelitian tersebut dikarenakan pemerintah desa Kecamatan Ngadirejo merupakan daerah yang mendapat alokasi dana desa dalam kategori 2 di Kabupaten Temanggung. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirejo sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat desa yang belum maksimal dalam menyelesaikan laporan kegiatannya yaitu desa Giripurno dan Mangunsari. Hal tersebut dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sehingga dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya belum maksimal (LAKIP).

Desa tersebut masih terdapat aparatur pemerintah desa yang seenaknya saja. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengalami ketidaksesuaian, yang mana antara staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pada saat jam kantor, jam kerja pegawai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat kesulitan menyelesaikan segala keperluannya. Para aparatur desa datang kadang siang dan pulangpun tidak menentu dan membuat masyarakat harus menunggu dalam proses pelayanannya. Kemudian dalam menggunakan teknologi informasi perangkat desa hanya mengandalkan ke satu orang saja.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?
2. Apakah penerapan prinsip-prinsip *good governance government* berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?
4. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi penelitian terhadap empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa seKecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi aparatur pemerintah desa di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam akuntabilitas dana desa.

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendeskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good government* dan *good governance*.
- b. Bagi pemerintah desa diKecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada didalam pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi Linier Berganda dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *prinsipal* dan manajemen sebagai *agen*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham

Hendriksen dan Van Breda, 2002 (dalam Setyawati, 2010) yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari perluasan satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Salah satu individu ini menjadi agen untuk yang lain yang disebut prinsipal. Analoginya seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan itu. Para pemilik disebut evaluator informasi dan agen-agen mereka disebut pengambil keputusan. Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang prinsipal dan

seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

2. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Kinerja merupakan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan (Atmosudirdjo, 2012). Sementara menurut Mahsun (2016) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut Santoso (2009) ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dengan adanya keterlambatan dalam pengesahan menyebabkan banyak program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan sehingga menghambat pembangunan daerah tersebut.

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai), yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu Wuri et al., (2017). Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Kontrak Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Penelaahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja merupakan dasar pelaksanaan efisiensi tata kelola untuk menjamin peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan memperjelas keluaran dan hasil yang akan dan harus dicapai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bertanggung jawab. Pengukuran kinerja umumnya digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sejalan dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai misi dan visi instansi pemerintah.

3. Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa

Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami dan mematuhi atau memahami (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2015). Sedangkan menurut Soekidjo, (2007) memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusunan, penggunaan, dan

pemeriksaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi panduan untuk menyatukan pendapat antara pemerintah desa untuk mengelola dana desa. Pemahaman pemerintah desa dapat memberikan dampak pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemahaman Permendagri No. 113 ini menyangkut pemahaman: Rencana Keuangan Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Keuangan desa, Aset dana dan Kewajiban Desa. Pemahaman pegawai pemerintah memberikan dampak terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standart. Jika pegawai pemerintah desa tidak memahami tentang peraturan pemerintah pengelolaan dana desa, maka dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan tidak akan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian dalam pemahaman peraturan pemerintah juga akan dapat mengarahkan perilaku pejabat dari pengaruh buruk.

Dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah aturan akan menjadi pedoman bagi seluruh pertimbangan yang menyebabkan seseorang pejabat akan berorientasi pada sasaran anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi, jika dihadapkan dengan berbagai kepentingan, kebutuhan dan keinginan material yang harus dipenuhi menyebabkan pejabat akan melakukan penyimpangan secara sengaja, melakukan perbuatan salah dan tindakan yang tidak patuh akan adanya hukum. Kondisi ini akan berdampak terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Bawono, 2019). Dalam PP No 60 tahun 2014, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Perhitungan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka, kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yakni 10% dari dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

4. Penerapan Good Government Governance

Konsep *governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, *government governance*, dan *local governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang dapat diandalkan,

pemerintahan yang dapat bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisiensi dan efektifitas dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state private sector and society*) (Sari, 2013).

Menurut Astuti (2016) *good governance* merupakan sebuah paradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintah yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi publik yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Ulfah (2018) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Elemen yang paling penting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, karena manusia yang menjalankan program dan mengatur serta melakukan semua kegiatan dan aktivitas suatu entitas ekonomi. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah hal penting dengan pekerjaan yang dilakukannya, karena pentingnya peran sumber daya manusia sebagai penentu organisasi atau instansi. Tingginya kompetensi

SDM di suatu organisasi maka akan mempengaruhi kualitas kompetitif perusahaannya (Pratiwi & Ulfah, 2018).

Sumber daya manusia adalah kemampuan dari pegawai menjalankan proses pemeriksaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pemeriksaan, pelatihan-pelatihan, dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan (Sari dkk, 2013). Kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dan juga sangat menentukan keberhasilan pemerintah. Menurut Alimbudiono & Andono, (2004) untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsidapat dilihat dari tingkat tanggung jawab dan kualitas sumber daya tersebut.

Sumber daya manusia tersebut yang dimaksud secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah desa yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan. Seperti yang telah diketahui bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting didalam suatu organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Pratiwi & Ulfah (2018) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

6. Teknologi Informasi

Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas (Agatha & Handayani, 2020). Menurut Nasir & Oktari, (2011) teknologi merupakan suatu jaringan computer yang terdiri dari berbagai jenis hardware, software, manajemen data dan teknologi informasi. Sedangkan menurut Putra et al., (2015) mengenai faktor-faktor yang dikaitkan dengan pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap pekerjajialah salah satu teori yang dikembangkan oleh Fred Davis mengenai perilaku penggunaan dan penerimaan sistem teknologi informasi yang dikenal dengan model *Technology Acceptence Model* (TAM).

Pada Peraturan Pemerintah No. 56 (2005) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa penyampaian informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis maupun media lainnya. Teknologi informasi berkaitan dengan computer, perangkat, serta jaringan seperti internet, selain sebagai teknologi komputer yang diperuntukkan dalam pemrosesan dan penyimpanan yang berfungsi sebagai media teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi. Teknologi informasi meliputi segala alat ataupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data (*capture*), menyimpan (*saving*), mengolah

(*process*), mengirim (*distribute*), atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik kedalam berbagai format, yang bermanfaat bagi pemakai informasi.

Seiring berjalannya waktu aktivitas di desa semakin banyak, tidak mungkin akan dilakukan secara manual terus-menerus. Oleh karena itu perlu didukung dengan adanya teknologi dan sekaligus untuk memanfaatkan agar kinerja menjadi maksimal. Dengan adanya teknologi, pemerintah dapat dengan mudah untuk menyalurkan informasi yang didapat kepada masyarakat maupun informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Peran teknologi informasi pada era saat seperti ini sudah sangat melekat sekali dalam kehidupan manusia. Mulai dari berinteraksi, belajar, membaca berita, transaksi dan lain sebagainya sudah menggunakan produk-produk teknologi informasi (Agatha & Handayani, 2020).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nurjaya et al., (2021)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Desa	Kompetensi Sumber Daya dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Desa,
2		Variabel	Partisipasi Anggaran dan Budaya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Agatha & Handayani, (2020)	Independen: Partisipasi Anggaran, Budaya Organisasi, Teknologi Variabel Dependen: Kinerja Aparat Pemerintah Desa	Organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa. Sedangkan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa
3	Wattimena, (2020)	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance, Good Governance,</i> kepemimpinan situasional Variabel Dependen: Kinerja Pegawai	<i>Good Corporate Governance, Good Governance,</i> dan Kepemimpinan Situasional berpengaruh terhadap kinerja pegawai
4	Dariana & Harrie, (2020)	Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan, Teknologi Informasi, Kompetensi, Ketaatan peraturan perundang-undangan, Variabel Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Ketaatan Peraturan Perundangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
5	Ramadhan, (2019)	Variabel Independen: Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan Variabel Dependen:	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
6	Pratiwi & Ulfah (2018)	Variabel Independen: Pemahaman Peraturan Pemerintah Pengelolaan Dana Desa, <i>Good Government Governance</i> , Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemahaman tentang peraturan pemerintah pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa. Sedangkan <i>Good Government Governance</i> dan Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa.
		Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	
7	Riandani, (2017)	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Pemanfaatan Informasi, dan Pengendalian Intern Teknologi	Kompetensi SDM, berpengaruh positif sedangkan Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan
		Variabel Dependen: Akuntabilitas Laporan Keuangan	
8	Claraini et al., (2017)	Variabel Independen: <i>good governance</i> , SPIP, Gaya Kepemimpinan	<i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah, Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah
		Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah	
9	Mubaraq, (2017)	Variabel independen:	Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan Kompetensi

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Ketaatan Perundang-undangan, Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah	aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi
10	Nurina dan M. Rizal Yahya, (2016)	Variabel Independen: Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal, Ketaatan Peraturan Perundang Veriabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Pemahaman Peraturan Pemerintah pada Akuntabilitas dana desa menurut Soekidjo, (2007) bahwa pemahaman peraturan pemerintah merupakan satu cara seseorang untuk mengetahui atau mematuhi sesuatu. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pemahaman peraturan pemerintah sudah dipakai sebagai pedoman aparatur pemerintah desa dalam mengelola dan dan menyusun laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang dibuat tanpa mengikuti aturan yang berlaku maka, laporan tersebut akan dianggap

tidak sesuai dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang akan menyebabkan kesulitan saat ditelusuri oleh auditor.

Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang prinsipal dan seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dengan memahami peraturan pemerintah, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Manajemen organisasi yang baik akan berjalan dengan baik jika hubungan antara prinsipal dan agen terjalin dengan baik. Adanya pemahaman terhadap peraturan pemerintah dapat membantu meningkatkan fungsi aparatur swadaya masyarakat pedesaan dalam pelayanan kepada masyarakat. Semakin baik pemahaman dalam peraturan pemerintah, semakin baik fungsi aparatur pemerintahan desa sendiri (Razi, 2017).

Menurut hasil penelitian Pratiwi & Ulfah, (2018) menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa, pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi sehingga dapat meningkatkan pemahamannya. Penelitian Nurina & Yahya, (2016) dan Mubaraq, (2017) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ramadhan, (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh

signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya sebagai berikut;

H1. Pemahaman Peraturan Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa

2. Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Good Governance yang baik didefinisikan sebagai tata kelola bisnis yang baik berdasarkan etika profesional dalam menjalankan usaha / pekerjaan. Tata kelola yang baik adalah bentuk penerimaan makna dari seperangkat aturan atau peraturan *good governance* untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan ekonomi dan pelayanan publik. Selain daripada itu istilah memerintah tidak hanya berarti memerintah sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengatur, mengarahkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan (Claraini et al., 2017).

Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang prinsipal dan seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Hal ini didukung dengan meningkatkan kualitas pengelola keuangan dengan diberikan diklat teknis serta bimbingan. Sedangkan dengan akuntabilitas anggaran yang baik, maka otomatis informasi keadaan keuangan yang disajikan sudah wajar dan tepat.

Mempertanggungjawabkan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memastikan pengelola keuangan sudah disiplin dalam bekerja agar tidak terjadi pemungutan liar ataupun terdapat yang terlibat KKN. SOP yang telah ditetapkan juga sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menerapkan *Good governace* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepuasan kerja kepada masyarakat (Pratiwi & Ulfah, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Ulfah (2018) menyatakan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap aparatur kinerja pemerintah dalam akuntabilitas dana desa.

Penelitian tersebut juga didukung oleh hasil dari penelitian yang dilakukan Claraini et al., (2017) dan Wattimena (2020) yang menyatakan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam akuntabilitas dana desa. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Dariana & Harrie (2020) menyatakan bahwa *Good Government Governance* juga berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut:

H2. Penerapan *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa

3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan karyawan untuk menjalankan proses pemeriksaan berdasarkan keterampilan, latar belakang pendidikan, dan persyaratan seseorang harus diikuti agar dapat melakukan prosedur pemeriksaan, pelatihan dan sosialisasi perubahan regulasi (Sari dkk, 2013). Secara umum, sumber daya manusia didalam pemerintahan desa rata-rata berpendidikan SLTA tetapi mereka mendapatkan yang cukup sehingga dapat meningkatkan peranannya dalam masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tumpuan untuk meningkatkan daya saing nasional.

Berdasarkan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika perangkat desa memahami pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa serta perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kualitas perangkat desa maka akan semakin tinggi pula pemahaman perangkat desa pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan lebih akuntabel. Oleh karena itu, dengan pemahaman perangkat di desa yang baik, akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan baik.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat penting untuk memasuki era ekonomi berbasis digital. Saat ini mayoritas aparatur desa sudah memiliki *Standar Operational Procedure* (SOP) yang tertuang dalam Perdes, dan telah memiliki tindakan disiplin atas penyelewengan. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan kedisiplinan bagi desa untuk melaksanakan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan (Sudiarianti, 2015). Berdasarkan penelitian yang terkait pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam akuntabilitas dana desa dilakukan oleh Pratiwi & Ulfah (2018) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Penelitian lain dilakukan oleh Riandani (2017) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap aparatur pemerintah dalam akuntabilitas dana desa. Nurjaya et al., (2021) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia yang semakin baik, maka akan menciptakan profesionalisme dalam bekerja. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut:

H3. Penerapan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa

4. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah (Rusdiana, A., 2014). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi kepada masyarakat. Banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa teknologi informasi data meningkatkan kinerja suatu organisasi Chowdhury, (2003) Morikawa dkk, (2004). Menurut Amin, (2010) bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang prinsipal dan seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dengan menggunakan teknologi informasi pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi kepada

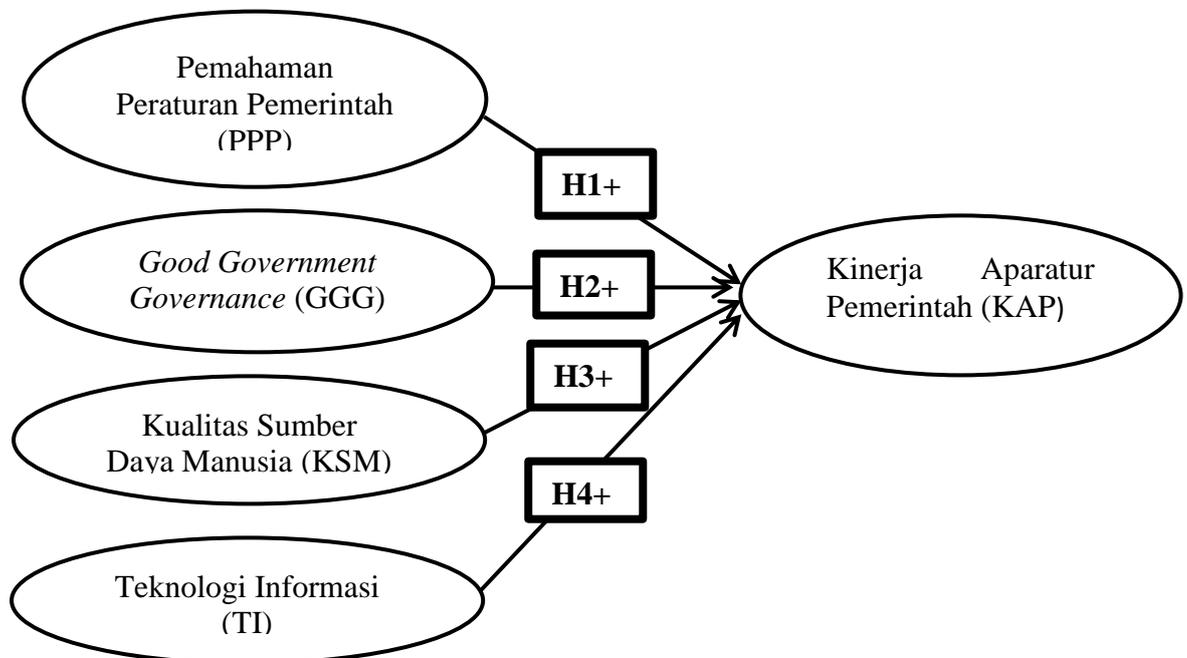
masyarakat. Selain itu, dengan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi.

Perkembangan Teknologi informasi tidak hanya digunakan pada organisasi bisnis, melainkan juga pada organisasi sektor publik, termasuk juga pemerintah. Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk perbaikan keterampilan manajemen dan mendistribusikan informasi keuangan ke pelayanan publik. Kebutuhan pemerintah mengoptimalkan penggunaan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen untuk memungkinkan proses kerja beroperasi secara terintegrasi dengan menyederhanakan akses antara satuan kerja (Agatha & Handayani, 2020).

Penelitian yang dilakukan Agatha dan Handayani, (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Penelitian yang dilakukan Suprianto, (2014), Resfiana & Syamsir, (2019) dan Chintya, (2015) menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Jika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan baik maka dalam melaksanakan tugas dan pertanggungjawaban akan berjalan dengan maksimal. Berdasarkan penelitian terkait dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H4. Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa

D. Model Penelitian



Gambar 2. 1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah atau komunitas yang terdiri atas objek/subjek yang dimiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;23). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngadirejo.

Sampel adalah sebagian dari populasi dan sampel yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria sampel yang digunakan untuk memilih responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa
- b. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun
- c. Tingkat pendidikan minimal SMP/SLTP

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono, (2017) dapat diartikan sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Pada umumnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara random.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Menurut Sekaran, (2006) deskriptif merupakan metode yang diteeliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan dilakukan dengan cara survey, yaitu dengan memberikan koesioner langsung diberikan kepada kriteria responden di Desa se-Kecamatan Ngadirejo. Koesioner yang sudah diisi oleh responden, akan diseleksi terlebih dahulu. Sehingga koesioner yang tidak lengkap tidak akan dimasukkan dalam analisis. Koesiener akan dipilih sesuai tujuannya untuk mempertimbangkan bahwa metode survei

lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya koesioner yang telah disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007).

Tabel 3. 1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen		
1. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Wuri et al., 2017).	Menggunakan instrumen dari Mahoney, (1963) yang terdiri dari 8 item pernyataan dengan indikator: 1. Perencanaan 2. Investigasi 3. Koordinasi 4. Evaluasi 5. Pengawasan Variabel ini diukur dengan skala likert 5 point dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju
Variabel Independen		
2. Pemahaman Peraturan Pemerintah	Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami dan mematuhi atau memahami (<i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i> , 2015).	Menggunakan instrument dari Pratiwi & Ulfah, (2018) yang terdiri dari 5 item pernyataan dengan indikator: 1. Pemahaman peraturan pemerintah Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju.

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
<p>Variabel Independen 2. <i>Good government governance</i></p>	<p><i>Good Government Governance</i> adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisiensi dan efektifitas dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (<i>state private sector and society</i>)(Sari, 2013).</p>	<p>Menggunakan instrument dari (mbarwati dkk, (2015) yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Kemandirian 3. Akuntabilitas 4. Pertanggungjawaban, Dan 5. Kewajaran. <p>Variabel ini diukur dengan skala likert 5 point dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju.</p>
<p>Variabel Independen 3. Kualitas Sumber Manusia</p>	<p>Daya Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan karyawan untuk menjalankan proses pemeriksaan berdasarkan keterampilan, latar belakang pendidikan, dan persyaratan seseorang harus diikuti agar dapat melakukan prosedur pemeriksaan, pelatihan dan sosialisasi perubahan regulasi (Sari dkk, 2013).</p>	<p>Menggunakan instrument dari Suharto, (2012) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Tanggungjawab 3. Pengalaman 4. Pelatihan <p>Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju.</p>

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen 5. Teknologi Informasi	Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas (Agatha & Handayani, 2020).	Menggunakan instrumen dari Komarasari, (2016) Yang terdiri dari 9 item pertanyaan dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah komputer yang ada dan tersedia 2. jaringan internet sudah terpasang dan dimanfaatkan sesuai ketentuan, 3. proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, 4. adanya software pendukung, 5. adanya jadwal pemeliharaan peralatan. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pemerintah, *good government governance*, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah desa adalah analisis regresi liner berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah

menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science (SPSS)*. Sebelum melakukan analisis, maka lebih terlebih dahulu harus melakukan uji validitas dan uji realibilitas.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari variabel yang digunakan dalam suatu penelitian (Ghozali, 2018;19). Dalam hal ini, analisis deskriptif memberikan penjelasan tentang ciri-ciri dari variabel yang digunakan untuk penelitian tersebut, menjelaskan perilaku individu dalam suatu kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018;51). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pembuktian Uji Validitas dilihat dari pengujiannya yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor individu masing-masing pernyataan dengan skor total dari variabel. Untuk menguji validitas tersebut menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Tujuan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai

unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel.

Analisis faktor konfirmatori dapat memverifikasi bahwa suatu indikator sebenarnya merupakan indikator dari suatu variabel. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan setiap indikator menjadi beberapa faktor jika indikator yang digunakan adalah indikator konstruks. Kemudian akan dikelompokkan menjadi satu dengan *faktor loading* yang tinggi. Jika ada kesulitan translasi selama pengelompokan, rotasi diperlukan. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi orthogal melakukan rotasi 90 derajat. Rotasi yang tidak 90 derajat disebut rotasi miring. Rotasi ortogonal dapat berupa *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax*, dan *Promax* (Ghozali, 2018-55).

Asumsi yang mendasari data, baik digunakan atau tidaknya analisis faktor, adalah bahwa matriks data harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* adalah uji statistik untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel. Semakin besar sampel, semakin sensitif uji *Bartlett test* dalam mendeteksi korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan apakah analisis faktor dapat dilakukan adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang dikehendaki untuk *cross loading* harus $> 0,50$ untuk melakukan analisis

faktor dan bias silang $>0,50$ untuk menentukan valid tidaknya setiap pernyataan (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali, (2018) uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel atau konstruk. Untuk menganalisis reabilitas, pengukuran dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan dengan menggunakan SPSS yaitu uji *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,7$

3. Analisis Regresi

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KAP = a + \beta_1 PPP + \beta_2 GGG + \beta_3 KSDM + \beta_4 TI + e$$

Keterangan:

KAP = Kinerja Aparatur Pemerintah

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

PPP = Pemahaman Peraturan Pemerintah

GGG = *Good Government Governance*

KSDM = Kualitas Sumber Daya Manusia

TI = Teknologi Informasi

e = Standar Error

4. Pengujian Hipotesis

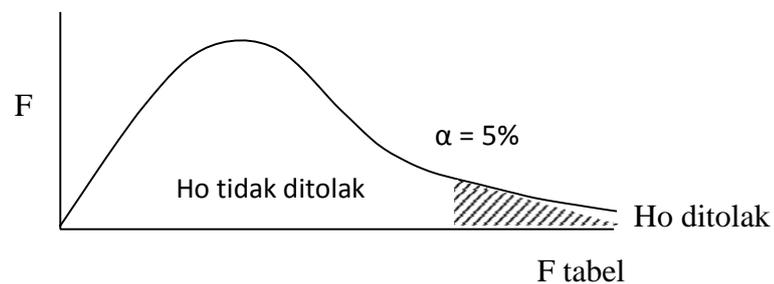
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model penelitian ini dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Dengan penjelasan bahwa nilai R^2 yang rendah berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Di sisi lain, nilai yang mendekati satu berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabilitas variabel dependen (Ghozali, 2018).

b. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai actual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel bebas mampu menjelaskan terhadap variabel terikatnya secara baik maka model regresi dinyatakan fit atau layak sebagai model penelitian (Ghozali, 2018). Menentukan F tabel dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan dalam penelitian bagus.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak atau H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus.

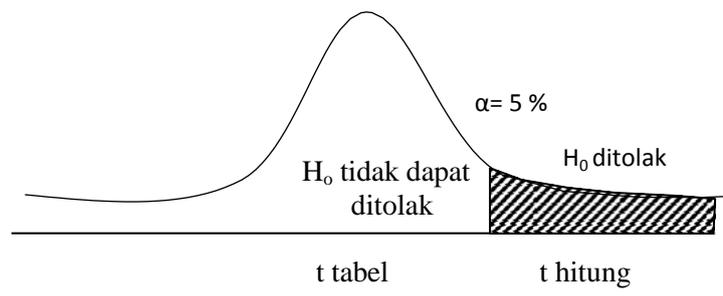


Gambar 3. 1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018). Kriteria penerimaan hipotesis positif sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji T

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, *good government governance*, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah pada desa se-Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh 57 responden yang dapat diolah dari 19 Desa di Kecamatan Ngadirejo.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Uji R² menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pemerintah, *good government governance*, kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi menjelaskan kinerja aparatur pemerintah desa 61,6% sedangkan sisanya sebesar 38,4% dimana ini dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.
2. Hasil Uji Statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ($F_{hitung} 23,437 > F_{tabel} 2,55$), yang artinya model yang digunakan sudah baik.
3. Hasil Uji t menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa tidak berpengaruh

kepada kinerja aparatur pemerintah desa, kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Berdasarkan hasil *adjust R square*, bahwa variabel yang digunakan menjelaskan kinerja aparatur pemerintah desa sebesar 61,6% sehingga masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa.
2. Pada penelitian menggunakan kuesioner karena terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

C. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yaitu sistem keuangan desa karena Siskeudes memiliki peran penting terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dan dapat membantu kinerja pegawai desa.
2. Penelitian selanjutnya selain menggunakan metode kuisisioner perlu juga menggunakan media seperti kuisisioner secara online dengan menggunakan google form dan wawancara. Dimana ini akan menghemat waktu dalam metoda penyebarannya dan mendapatkan

banyak informasi yang lebih akurat. Dalam pengolahan data menggunakan kuisisioner online dapat memudahkan dalam mengolah data-data hasil jawaban responden. Jawaban dari responden akan direkap secara otomatis. Dimana ini akan sangat membantu dan dapat memudahkan untuk membandingkan data-data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Ludia Ayu, & Handayani, N. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budaya Organisasi dan Telnologi Informasi Terhadap Kinerja Pemerintah Aparat Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9).
- Alimbudiono, R. S., & Andono, F. A. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 5(2), 18–30.
- Ambarwati W., Suyono, E., & P., & Ratiwi, U. (2015). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Aparatur Pemerintahan. *SNA*, 16. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Amin, M. A. M. (2010). Measuring the performance of Customs Information Systems (CIS) in Malaysia. *World Customs Journal*, 4(2), 89–104.
- Amran, A. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.35906/ja001.v5i1.527>
- Ardianto. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, 197–209.
- Astuti. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1, 1–14.
- Atmosudirdjo. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. STIA-Lembaga Administrasi Niaga Press.
- Bawono, I. R. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–14.
- Chowdhury, G. G. (2003). *Introduction to Digital Libraries*. Facet Publishing.
- Claraini, C., Savitri, E., & Wiguna, M. (2017). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 3110–3123.
- Dariana, & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 124–139.
- Ghozali, I. (2018). *Apikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2* (Edisi 5). Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

- Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad. *JOM Fekon*, 4(1).
- Ichsan. (2013). *Teori Keagenan (Agency Theory)*. <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/>. 16 Desember 2019. (22.04).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2015). <http://kbbi.web.id/paham>
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang). *E-JRA*, 10(06).
- Komarasari, W. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(2), 65–66. <https://doi.org/10.1021/om050941q>
- Kusuma, Ri. B. F., Susbiyani, A., & Fitriya, E. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 56, 1–9.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahoney, T. A. (1963). *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Marhaen, & Jaenab. (2021). *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pengembangan Potensi Dan Kinerja Pegawai Di BPMDES Kabupaten Bima*. 4(2), 886–895.
- Morikawa, T., H. Matsuda, I. Yamaguchi, Y. Pongpiriyadacha, and M. Y. (2004). *New Amides and Gastroprotective Constituents from the Fruit of Piper chaba*.
- Mubaraq, H. (2017). Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 19(02), 8841.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta.
- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut). *Polban*, 1299–1311. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1430-Article Text-2812-1-10-20190830.pdf
- Nurina, & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2).
- Nurjaya, Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4(3), 332–346.
- Pemerintah Kecamatan Ngadirejo. (2020). *RENSTRA*.
- Peraturan Pemerintah. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 429–440. <https://doi.org/2541-061X>
- Putra, D. E., Astuti, E. S., & Riyadi. (2015). Pengaruh Kemudahan Terhadap Kemanfaatan, Minat Dan Penggunaan E-Commerce. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 21(2), 1–8.
- Raheni, N. P. R., & Asri, D. P. I. G. A. . (2019). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1295. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19>
- Rahmawati. H.I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*, 6, 305–313.
- Ramadhan, H. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntanis, dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir*.
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 294–308.
- Republik, I. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Resfiana, & Syamsir. (2019). *Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari*. 1–7.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 4–28. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>
- Rumalolas, R. (2018). Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. *Jurnal Penelitian*

Politik.

- Rusdiana, A., dan M. I. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. CV. Pustaka Setia.
- Sari, N. P. Y. M. M., I Made Pradana Adiputra, S. E. (2013). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 2(1).
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Stephen, R. dan T. A. (2015). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Sudiarianti, N. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Penelitian Mandiri*, 4(71), 1–25.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. CV Alfabeta.
- Suharto, A. A. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, KOMitmen Dan MOTivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada inspektorat kabupaten kediri. *Ilmu Manajemen*, 3, 67–79.
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *Ekobis.....*, 15(1), 17–30.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/viewFile/552/454>
- Tarjo, T. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis*, 2(1), 53.
<https://doi.org/10.47201/jamin.v2i1.38>
- Temanggung, P. (2020). *LAKIP*.
- Toto Waksito, W. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kompetensi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Kabupaten Batang Dengan Variabel Moderating Pemahaman Terhadap Peraturan Yang Berlaku. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Batang)*.
- Wattimena, M. A. (2020). Implementasi Good Corporate Governance , Good Governance dan Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(2).
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
<https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. R. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Singsong Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).